ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Penyimpanan Padi Di Lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun" merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik penyimpanan padi pada lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ? dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik akad penyimpanan padi pada lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan tentang praktik penyimpanan padi di lumbung desa, kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam yakni *Wadi'ah*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik penyimpanan padi pada lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun terjadi ketika petani menitipkan hasil panennya kepada pengelola lumbung untuk menjaga dan mengelolanya dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati. pengelola lumbung menarik 20Kg pada setiap penyimpanan. Selain simpan-pinjam, pengelola juga melayani jual-beli padi. Petani dapat mengambil barang titipannya sewaktu - waktu ketika mereka membutuhkan padinya kembali. Namun terdapat aturan tambahan yang tidak tertulis dalam perjanjian, yakni ketika dalam kurun waktu satu tahun padi yang dititipkan tidak diambil, maka kepemilikan padi diambil alih oleh pengelola lumbung. Praktik akad penyimpanan padi pada lumbung desa ini tidak sesuai dengan prinsip akad wadiah. Karena adanya aturan tambahan yang tidak tertulis dalam perjanjian (akad) berupa pengambilalihan kepemilikan padi dari petani ke pengelola ketika dalam kurun waktu satu tahun tidak diambil.

Dari kesimpulan di atas, maka kepada pengelola lumbung padi tersebut, hendaklah diadakan pengkajian ulang terhadap isi perjanjian untuk lebih mendetail dalam penjelasan pada setiap aturan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara petani dan pengelola. Selain itu, seharusnya tidak ada pengambilalihan kepemilikan tanpa kesepakatan antara petani dan pengelola lumbung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id